

Krisis Utang Sri Lanka dalam Kerja Sama Pembangunan Proyek Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok

**Rona Azalia Hasanah^{1*}, Anita Afriani Sinulingga^{2*}, Diah Anggraini
Austin^{3*}**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Kota Padang, Indonesia

E-mail: ¹ronalia07@gmail.com*, ²nanisinulingga@gmail.com*,
³diahanggrainiaustin@soc.unand.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dari krisis utang Sri Lanka pada Proyek Pembangunan Pelabuhan Hambantota dengan China. Pelabuhan Hambantota dibangun dalam rangka memutar roda perekonomian yang sempat terpuruk setelah terjadinya 25 tahun perang saudara. Selain itu, pelabuhan ini terletak pada posisi yang strategis di jalur pelayaran internasional dan hal ini mendorong China untuk bekerja sama dengan Sri Lanka dengan mendanai sebagian besar biaya pembangunan pelabuhan. Namun, proyek yang seharusnya meningkatkan ekonomi Sri Lanka, justru membawanya ke dalam krisis utang. Penelitian ini menggunakan konsep krisis utang Theodore H. Cohn di tingkat negara. Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan eksplanatif. Studi ini menemukan bahwa krisis utang di Sri Lanka terjadi karena perilaku tidak bertanggung jawab dari kedua pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama ini. China sebagai kreditur secara agresif meminjamkan dana kepada Sri Lanka tanpa melihat kewajiban kredit Sri Lanka. Di sisi lain, Sri Lanka sebagai debitur cenderung menghindari kondisi yang dianggap memberatkan mereka dan pemerintah tidak mampu menangani defisit anggaran yang berkepanjangan, tidak mampu membuat kebijakan yang baik dalam menghadapi situasi utang, kurangnya transparansi, dan tingkat korupsi yang tinggi.

This research aims to analyze the cause of Sri Lanka's debt crisis in Hambantota Port Development Project with Tiongkok. Hambantota Port was built in order to turn the wheels of the economy that had been collapsed after 25 years of civil war. Besides, this port is located in strategic position in international shipping lines and this urged China to cooperate with Sri Lanka by funding most of the port development cost. However, the project that was supposed to enhance Sri Lanka's economy, leads Sri Lanka into debt crisis. This research uses Theodore H Cohn's concept of debt crisis in nation level. Data collection techniques and analysis were carried out using qualitative methods and explanative approaches. This study found that Sri Lanka's debt crisis occurs because of irresponsible behavior of the both party that participated in this cooperation. China as the creditor aggressively lends Sri Lanka without respectively looking at Sri Lanka's credit liability. On the other hand, Sri Lanka as the debtor tends to avoid the conditions that they thought as burdensome for them and the government was not able to handle the prolonged budget deficit, not able to make a good policy in facing debt situation, lack of transparency and high level of corruption.

Key Words : China, Cooperation, Debt Crisis, Hambantota Port, Sri Lanka

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Sri Lanka dan Tiongkok telah terjalin sejak kemerdekaan Sri Lanka dan dipererat lagi dengan bantuan berupa pendanaan dan dukungan lain yang diberikan kepada Pemerintah Sri Lanka dalam perang sipil melawan kelompok separatis *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) (Patrick Hein, 2017). Hal inilah yang membuat Sri Lanka di bawah Pemerintahan Presiden Rajapaksa menjalin kedekatan dengan Tiongkok. Salah satu kerja sama pembangunan yang dilakukan adalah proyek Pelabuhan Hambantota yang diinisiasi oleh Pemerintah Sri Lanka.

Sebuah kerja sama terjalin karena terjadinya pertemuan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Bagi Sri Lanka, proyek ini merupakan upaya memaksimalkan posisi geostrategisnya. Pelabuhan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan perdagangan Sri Lanka karena Hambantota terletak di salah satu jalur perkapalan tersibuk di dunia, hanya berjarak 10 mil laut dari jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Eropa, Terusan Suez dan Selat Malaka. Selain itu, pelabuhan ini juga menjadi tempat transit yang dekat dengan India dan Afrika, sehingga dapat menciptakan peluang akses untuk memperluas pasar di subkontinen India.

Bagi Tiongkok, dengan terlibat dalam proyek tersebut, ia bisa melindungi keamanan energinya karena dua pertiga jalur impor minyak Tiongkok berada di jalur ini. Melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok mampu membuka prospek bagi Sri Lanka untuk pusat perdagangan dan logistik regional. Ketersediaan dana Tiongkok mampu membantu Sri Lanka yang terkendala dalam pendanaan proyek yang membutuhkan miliaran USD ini.

Pada perjalanannya, Pelabuhan Hambantota yang diharapkan dapat menunjang perekonomian negara sejak pertama kali mulai beroperasi masih belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi Sri Lanka. Meskipun jalur perairan sekitar Hambantota adalah jalur yang strategis, kapal yang bersandar

di pelabuhan ini sangat sedikit sehingga Sri Lanka kembali melakukan pinjaman pada Tiongkok pada tahun 2010 untuk meningkatkan pelabuhan. Tetapi kemudian, berdasarkan laporan tahunan Menteri Keuangan Sri Lanka, tercatat hanya ada 34 kapal yang merapat di Hambantota pada tahun 2012, berbanding terbalik dengan pelabuhan Kolombo yang disinggahi 3667 kapal.

Pelabuhan yang dinilai strategis ini justru mengalami defisit dalam jumlah besar akibat besarnya biaya operasional dan utang kepada Tiongkok tidak dapat ditutupi dengan pendapatan yang dihasilkan. Bahkan, dilihat dari data Departemen Sensus dan Statistik Sri Lanka tahun 2017, ditemukan bahwa Pelabuhan Hambantota merupakan satu-satunya pelabuhan yang mengalami penurunan persentase pertumbuhan jumlah kunjungan kapal tahunan dan penurunan performa dalam kemampuan penanganan jumlah kargo. Sri Lanka kesulitan dalam pembayaran utang karena tingginya bunga yang diberlakukan Tiongkok, yakni 6.3%. Hal ini berujung kepada krisis utang, di mana Sri Lanka mengalami krisis utang dan kehilangan kemampuan dalam membayar utang yang telah mencapai 77.6% dari GDPnya kepada Tiongkok yang jatuh tempo pada akhir tahun 2016. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena kerja sama antara Sri Lanka dan Tiongkok dalam pembangunan Pelabuhan Hambantota yang dinilai strategis justru menimbulkan kerugian di salah satu pihak, yaitu krisis utang yang dialami Sri Lanka.

METODE

Pada bagian ini jelaskan bagaimana Anda melakukan penelitian. Penulis harus menjelaskan dengan rinci apa yang dilakukan, bagaimana penelitian dilaksanakan, termasuk demografi data, jumlah responden, alasan pemilihan responden, prosedur penelitian, survei, wawancara, observasi, waktu pelaksanaan. Tuliskan dengan rinci prosedur penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kasus ini, ditemukan bahwa kerugian dari Pelabuhan Hambantota bukanlah penyebab tunggal dari krisis utang, tetapi juga dikarenakan kebijakan lain yang diberlakukan pemerintah serta permasalahan proyek lainnya.

Tindakan Tak Bertanggung Jawab Kreditur

1. Pemberian pinjaman secara agresif tanpa memperhatikan kelayakan kredit Sri Lanka

Tiongkok tetap konsisten memberikan pinjaman kepada Sri Lanka yang keuangan negaranya sudah berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Ketidakmampuan Sri Lanka ini tidak serta merta dikarenakan oleh minimnya pendapatan dari Pelabuhan Hambantota saja, tetapi juga karena permasalahan internal Sri Lanka itu sendiri, yaitu kegoyahan ekonomi politik pasca perang sipil yang berlangsung selama hampir tiga dekade. Merespon keadaan tersebut, Tiongkok memberikan utang luar negeri sesuai Delapan Prinsip Bantuan Ekonomi dan Kerja Sama Teknis dengan Negara Lain yang digagas oleh Perdana Menteri Zhou Enlai pada tahun 1964, salah satunya non-interferensi, yang artinya Tiongkok menghormati kedaulatan negara tersebut dengan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara penerima dan tidak memberikan persyaratan apapun dalam pemberian bantuan.

Ketika berbagai pihak menolak untuk memberikan bantuan karena investasi proyek multimiliar di negara yang perekonomiannya masih goyah dinilai sangat riskan dan dikhawatirkan Sri Lanka tidak mampu membayar utangnya di kemudian hari. Menurut Cohn, tindakan ini merupakan tindakan yang bertanggung jawab. Di keadaan yang demikian, Tiongkok justru konsisten memberikan bantuan senilai lebih dari 8 miliar hingga tahun 2017. Dalam hal inilah Tiongkok melakukan tindakan yang tak bertanggung jawab sebagai kreditur. Bagi Sri Lanka, mendapatkan pihak alternatif yang bersedia untuk menyediakan uang yang dibutuhkannya tentu dipandang sebagai hal yang

menguntungkan. Tetapi, hal ini hanya menguntungkan dalam jangka pendek saja. Dalam jangka panjang, kemampuan Sri Lanka dalam membayar utangnya tidak berbanding lurus dengan jumlah utang yang dimilikinya. Idealnya, ketika debitur sudah terlihat tidak akan mampu melunasi utangnya, kreditur menghentikan pinjaman agar tidak terjadi penumpukan utang yang justru akan berakibat pada situasi utang yang lebih parah di kemudian hari, yaitu krisis utang.

2. Peningkatan suku bunga setelah dependensi Sri Lanka terhadap Tiongkok semakin tinggi

Suku bunga pinjaman yang diberikan Tiongkok kepada Sri Lanka sejak awal tidaklah rendah. Bahkan, suku bunga yang diberlakukan Tiongkok adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya. Tiongkok menetapkan bunga sebesar 6.3%, sementara pihak lain seperti *World Bank* dan *Asia Development Bank* (ADB) hanya berkisar sekitar 0.25% hingga 3% dan *Indian Credit Line*, negara tetangga dan negara yang dekat dengan Sri Lanka itu sendiri hanya 1% dan bahkan dalam terkadang bisa lebih rendah dari itu. Suku bunga pada pinjaman-pinjaman berikutnya yang diberikan Tiongkok pada Sri Lanka justru menurun, yaitu hanya 2%.

Sri Lanka tetap meminjam kepada Tiongkok dan bukan kepada kreditur lain karena ia tidak memiliki alternatif lain, mengingat situasi Sri Lanka yang saat itu mendapat kecaman dan penolakan pemberian bantuan karena persoalan pelanggaran HAM pada masa perang sipil dengan LTTE. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, Tiongkok tidak memberlakukan ketentuan yang ketat dalam project safeguardnya. Ketiadaan tawaran yang kompetitif untuk proyek Pelabuhan Hambantota ini justru menandakan bahwa pihak-pihak yang berpotensi untuk menjadi kreditur tidak melihat keuntungan yang potensial atau yang sepadan dengan resiko proyek tersebut. Maka dari itu dapat

disimpulkan bahwa poin Cohn ini tidak berlaku dalam kasus krisis utang Sri Lanka.

Tindakan Tak Bertanggung Jawab Debitur

1. Tindakan Sri Lanka menghindari ketentuan yang baginya memberatkan

Suku bunga yang ditetapkan Tiongkok dalam pinjamannya sangat tinggi dibandingkan pihak lain, di mana Tiongkok 6.3%, sementara *World Bank* dan *Asia Development Bank* (ADB) hanya berkisar sekitar 0.25% hingga 3% dan *Indian Credit Line* paling tinggi hanya 1%. Institusi tersebut serta Jepang dan negara Barat menolak untuk memberikan bantuan karena alasan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Sri Lanka dinilai tidak memiliki *commercial viability* sehingga pihak-pihak tersebut khawatir akan dirugikan nantinya akibat utang yang tak bisa dilunasi. Artinya, untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah tersebut Sri Lanka harus mampu mendongkrak perekonomiannya dan meningkatkan daya saingnya. Akan tetapi, Sri Lanka lebih memilih untuk mangkir karena dari sudut pandang Presiden Mahinda Rajapaksa, cara memperbaiki ekonomi Sri Lanka adalah dengan membangun Pelabuhan Hambantota itu sendiri.

Dari segi politik, pihak-pihak di atas tidak bersedia memberikan bantuan karena pelanggaran HAM yang telah dilakukan dalam perang sipil antara pemerintah dan kelompok separatis Tamil Tiger. Akan tetapi, dalam kondisi tersebut, Sri Lanka di bawah pemerintahan Presiden Rajapaksa tetap abai terhadap isu HAM yang mendapat kecaman dari komunitas internasional tersebut. Menurut Cohn, idealnya debitur mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman selama ketentuan tersebut baik untuk negaranya sendiri, seperti halnya perbaikan dan pemulihan perkara pelanggaran HAM ini. Akan tetapi, karena bagi Sri Lanka hal ini dinilai memberatkan, ia lebih memilih

untuk mencari alternatif lain, dalam hal ini Tiongkok, yang tidak mempedulikan aspek-aspek tersebut karena prinsip non-interferensi yang dianutnya.

IMF menolak memberi bantuan karena prinsip dasarnya yaitu negara yang sedang berutang tidak boleh memiliki akses tak terbatas atas pembiayaan neraca pembayaran dan harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Sri Lanka menghindari kondisi tersebut karena prinsip itu sendiri sudah tidak sejalan dengan visinya dalam membangun Pelabuhan Hambantota. Bagi Sri Lanka, penyesuaian dan pembayaran utang-utang tersebut akan dapat dilakukan setelah pelabuhan tersebut sukses dan mampu menghasilkan penghasilan yang banyak.

2. Ketidakmampuan Pemerintah dalam menangani defisit anggaran berkepanjangan yang mengakibatkan kelemahan finansial

Pengurangan defisit anggaran dengan meningkatkan pendapatan Pemerintah adalah tantangan yang telah dihadapi Sri Lanka sejak lama. Pada tahun 2011, 87% dari pendapatan publik Sri Lanka berasal dari pemungutan pajak, hal ini membuat pajak menjadi sumber paling penting bagi pendapatan publik tersebut. Karena itulah minimnya pendapatan pajak berdampak pada kemampuan Sri Lanka memenuhi kebutuhannya dan kemampuannya membayar utang, hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Sri Lanka dalam menangani defisit anggaran.

Pada tahun 2007, hanya 9% karyawan formal yang dikenakan pajak dan Pemerintah mengumpulkan pajak sebesar 12.2 miliar LKR. Kemudian pemerintah memperbarui sistem perpajakan pada tahun 2011, di mana dalam kebijakan tersebut pegawai negeri juga dikenakan pajak, tetapi pajak yang didapatkan hanya senilai 6.3 miliar LKR. Rendahnya tarif pajak dan tingginya ambang batas pajak merupakan penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan pajak dan dasar pengenaan pajak. Penurunan penghasilan ini terjadi akibat penerapan kebijakan yang kurang tepat, dan di sini terlihat pula

ketidakmampuan Sri Lanka menciptakan kebijakan yang tepat untuk perkembangan ekonominya.

Bersamaan dengan defisit anggaran yang berkelanjutan, besarnya tekanan dalam finansial publik terkait investasi infrastruktur dan upaya rekonstruksi pasca konflik mengakibatkan pemerintah harus memprioritaskan peningkatan dasar pengenaan pajak atau *tax base* dan pemungutan pajak. Bank Sentral Sri Lanka pada tahun 2015 menyatakan bahwa pendapatan pajak negara bahkan tidak mencukupi untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Menanggapi hal ini, pemerintah pun terpaksa mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan utang. Akibatnya, Sri Lanka bergantung pada utang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tanpa adanya sumber daya yang memadai untuk melunasi utang-piutangnya.

Tak hanya itu, keadaan Sri Lanka yang demikian menjadi sumber kekuatan Tiongkok, kekuatan dalam artian memiliki posisi yang lebih berkuasa daripada Tiongkok dalam proyek Pelabuhan Hambantota yang pada tahun 2017, 80% sahamnya dipegang oleh Tiongkok dan pelabuhan tersebut akan disewakan selama 99 tahun kepada Tiongkok melalui perjanjian konsesi.

Pertama, beban utang, yang mana Sri Lanka bergantung pada utang sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan sumber utang luar negeri tersebut adalah Tiongkok. Kedua, kegagalan proyek Pelabuhan Hambantota dalam menghasilkan pendapatan pajak yang besar seperti yang diperkirakan oleh Sri Lanka dalam perencanaan pembangunan proyek. Dalam hal ini, seharusnya utang tidak menjadi beban jika setidaknya satu dari dua kondisi terpenuhi, yaitu proyek mampu menghasilkan pajak yang memenuhi pembayaran utang atau proyek mampu membantu perkembangan kapasitas dan keahlian lokal.

Kedua hal di atas tidak bisa terlaksana karena Pelabuhan Hambantota sepi pengunjung dan karena pelabuhan ini tidak mampu menghasilkan pajak yang cukup dan pembangunan proyek yang hanya melibatkan pekerja Tiongkok,

sesuai kesepakatan yang disetujui di awal kerja sama. Jadi, Sri Lanka tidak mampu menangani defisit anggaran yang berkepanjangan akibat rendahnya pendapatan pajak negara. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya kepatuhan wajib pajak penduduk Sri Lanka sehingga pajak yang terkumpulkan sedikit. Kedua, pembaruan kebijakan perpajakan yang justru mengakibatkan pendapatan pajak menurun. Ketiga, melesetnya perkiraan Sri Lanka sebelum pembangunan proyek, yaitu proyeksi atas keberhasilan Pelabuhan Hambantota yang akan mampu menghasilkan pendapatan pajak yang tinggi dan kemudian dialokasikan untuk pelunasan utang dan pemutar roda perekonomian Sri Lanka, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Tindakan inilah yang dikatakan sebagai tindakan tak bertanggung jawab Sri Lanka sebagai debitur hingga berakibat pada terjadinya krisis utang.

3. Ketidakmampuan Pemerintah membuat kebijakan yang baik dalam menyikapi situasi utang

Proyek yang menggiring Sri Lanka menuju situasi krisis utang tidaklah hanya Pelabuhan Hambantota saja, tetapi juga megaprojek lainnya yaitu Bandara Internasional Mattala Rajapaksa dan *Colombo Port City* (CPC) yang diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa bekerja sama dengan Tiongkok. Rajapaksa yang memerintah selama satu dekade, yakni dari tahun 2005 hingga 2015, melakukan pembangunan berorientasi infrastruktur, dengan pembangunan tersebut, tak hanya diharapkan visi Sri Lanka sebagai maritim hub di Samudera Hindia tercapai, tetapi juga mendongkrak perekonomian Sri Lanka yang mengalami kemerosotan akibat perang sipil yang berlangsung selama 25 tahun.

Bantuan dari Tiongkok dialokasikan ke proyek-proyek besar seperti Pelabuhan Hambantota sebesar 1.3 miliar USD dan Bandara Internasional Mattala Rajapaksa senilai 220 juta dengan ekspektasi proyek-proyek tersebut akan mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan pendapatan tersebutlah

yang akan digunakan Pemerintah Sri Lanka untuk melunasi utang-utangnya tanpa kesulitan yang berarti.

Sri Lanka Port Authority (SLPA) memperkirakan Pelabuhan Hambantota mencapai titik impas atau balik modal pada tahun 2015 dan diharapkan mampu mendapatkan keuntungan yang besar ketika 16 industri yang direncanakan bergerak di ZEE Hambantota mulai beroperasi. Akan tetapi, pada perjalanannya ternyata proyek ini tidak mampu mendapatkan hasil yang diharapkan karena minimnya pengunjung. Tak hanya itu, Pemerintah Sri Lanka juga harus menghabiskan dana berjumlah besar untuk memperbaiki pembangkit listrik Lakwijaya di Norochchollai yang dibangun oleh Tiongkok. Keadaan ini berakibat pada kesulitan pembayaran utang Sri Lanka.

Situasi ini diperburuk dengan kontroversi *Colombo City Project* (CPC), yang mana Tiongkok diberikan hak kepemilikan atas 20 hektar tanah reklamasi dan 88 hektar disewakan selama 99 tahun, yang mana hal ini menuai protes dari masyarakat Sri Lanka karena dapat mengancam kedaulatan negara. Merespon hal ini, Sri Lanka menyatakan akan memulai kembali proyek CPC dengan beberapa perubahan terkait kepemilikan atas lahan reklamasi, maka dengan itu proyek CPC ditunda.

Menteri Keuangan Sri Lanka, Ravi Karunanayake menyatakan bahwa utang pada Tiongkok adalah bagian yang sangat besar dalam permasalahan negara karena sebagian besar pengeluaran negara ditujukan untuk membayar utang-utang tersebut. Ia kemudian meminta Tiongkok untuk mengubah ketentuan pinjaman agar menjadi lebih layak, akan tetapi Tiongkok terlihat tidak menyediakan ruang negosiasi terkait utang tanpa adanya penyelesaian kasus CPC, yaitu proyek yang ingin dibatalkan oleh Tiongkok dan diselesaikan melalui jalur hukum. Tetapi tentunya jika hal tersebut dilaksanakan, maka Sri Lanka harus mengeluarkan biaya kompensasi yang sangat besar, sementara

perusahaan Tiongkok yang mengontrak CPC melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 380 USD perharinya akibat penundaan proyek.

Hal-hal tersebut mengakibatkan dilema dimana Sri Lanka seharusnya mengurangi intensitas utang pada Tiongkok dengan mengurangi dependensinya, akan tetapi Sri Lanka juga butuh Tiongkok untuk mendanai pembangunannya. Pada akhirnya, Pemerintahan Presiden Rajapaksa yang berorientasi infrastruktur ini tidak mampu membuat kebijakan yang tepat untuk meredakan kondisi keuangan yang semakin sulit dan juga tidak mampu mencegah terjadinya krisis utang.

Pada pemerintahan presiden berikutnya, Sirisena, ia melakukan berbagai upaya mengurangi dependensi terhadap Tiongkok melalui balanced foreign policy, yaitu kebijakan untuk menciptakan hubungan setara dengan mengimbangkan hubungan dan kebijakan luar negerinya dengan India dan Tiongkok demi meminimalisir ketergantungan kepada salah satu pihak (Tiongkok). Akan tetapi, upaya Sirisena dalam menepati janji-janji kampanyenya tetap saja terhambat akibat kesenjangan kekuatan Tiongkok dan Sri Lanka. Negosiasi penundaan proyek CPC juga gagal sehingga akhirnya CPC terpaksa tetap dilanjutkan.

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata Sri Lanka tetap tidak mampu membuat kebijakan yang terbaik dalam situasi krisis utang karena Tiongkok memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Situasi ini memaksa Sri Lanka untuk harus mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok karena penting untuk pertumbuhan ekonomi Sri Lanka yang sudah terlanjur dependen. Pada akhirnya, kebijakan yang dibuat Sri Lanka harus mengikuti atau sejalan dengan keinginan Tiongkok. Akibatnya, situasi krisis utang pun tak terelakkan.

4. Minimnya transparansi dan tingginya korupsi

Elemen-elemen penting yang harus dilaksanakan agar korupsi bisa diperangi secara efektif ada dua. Pertama, negara harus memiliki hukum yang baik dan

jasas serta regulasi yang mudah dilaksanakan. Elemen ini membutuhkan pengadilan yang jujur dan independen atau bebas dari tekanan politik. Kedua, menghilangkan kontrol yang tidak perlu dalam perekonomian dan mengurangi keterlibatan negara atau pemerintah dalam perekonomian. Akan tetapi, studi menemukan bahwa ternyata elemen-elemen tersebut tidak dilaksanakan, sehingga korupsi tetap menjadi persoalan panjang yang tak mampu diberantas.

Di sepanjang perjalanan sejarahnya, Pemerintah Sri Lanka tidak pernah berhasil memusnahkan korupsi akibat rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Bukan berarti semua pemimpin dan sistem Pemerintahan Sri Lanka abai. Ada pemimpin yang telah berupaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi meminimalisir dan memberantas korupsi, akan tetapi tetap saja upaya-upaya tersebut tidak efektif akibat budaya politik dan pemerintahan Sri Lanka.

IMF memperkirakan 30% keuntungan yang didapatkan negara berkembang melalui investasi, termasuk dalam infrastruktur, terutama dalam proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) hilang akibat perencanaan dan implementasi yang tidak efisien serta maraknya korupsi. Hal inilah yang juga terjadi dalam kerja sama ataupun kesepakatan antara Sri Lanka dan Tiongkok. Kesulitan seperti ini akan terus berlanjut jika Sri Lanka tidak memberantas korupsi, memperkuat institusi pemerintah, dan mengejar kemitraan yang lebih bersifat berkelanjutan atau sustainable dengan debitur dan investor asing.

Minimnya transparansi mengakibatkan tingginya korupsi dan juga rendahnya informasi yang diketahui oleh publik, termasuk pihak politik oposisi. Akibatnya, ketika pihak oposisi memenangkan pemilu dan menjabat, mereka tidak mampu untuk membuat kebijakan yang benar-benar baik dan tepat secara cepat untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang telah ada dan mengakar di periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini pun memberikan

peluang kepada Tiongkok untuk mendapatkan kekuatannya di Sri Lanka. Dengan kata lain, tindakan tak bertanggung jawab Sri Lanka itu sendirilah yang mengakibatkan negaranya menjadi tidak memiliki banyak pilihan ketika beban utangnya semakin berat.

Presiden Sirisena menyebutkan persoalan transparansi sebagai justifikasi saat mengeluarkan kebijakan untuk menunda proyek CPC sebagai salah satu bentuk pemenuhan janji kampanyenya yaitu mengurangi dependensi Sri Lanka terhadap Tiongkok. Akan tetapi, penundaan ini tak berlangsung lama, yaitu tidak sampai satu tahun karena rendahnya bargaining position Sri Lanka dalam negosiasi dengan Tiongkok sehingga tidak mampu menang dari desakan Tiongkok untuk melanjutkan kembali pembangunan proyek CPC.

KESIMPULAN

Krisis utang Sri Lanka disebabkan oleh tindakan tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Tiongkok sebagai kreditur maupun Sri Lanka sebagai debitur. Tiongkok telah memberikan pinjaman secara agresif tanpa memperhatikan kelayakan kredit Sri Lanka. Sri Lanka menghindari ketentuan yang baginya memberatkan, tidak mampu menangani defisit anggaran berkepanjangan sehingga mengakibatkan kelemahan finansial, tidak mampu membuat kebijakan yang tepat dalam menyikapi situasi utang, serta minimnya transparansi dan tingginya korupsi .

DAFTAR PUSTAKA

Book

Cohn, T. H. (2012). *Foreign Debt and Financial Crisis* (Global Pol). Peason Education.

Book chapter

McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008). Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch (Eds.), *Knowledge as value: Illumination through critical prisms* (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.

Journal article

Arunatilake, N., Jayawardena, P., & Wijesinha, A. (2012). *Tax Reforms in Sri Lanka: Will a Tax on Public Servants Improve Progressivity?*

Attanayake, C., & Kapur, R. (2018). Mahinda Rajapaksa: An Influential Figure in Sri Lanka Politics. *Institute of South Asian Studies Brief*, 621, 1–2.

Central Bank of Sri Lanka. (2015). *Annual Report*.

Ferchen, M., & Perera, A. (2019). Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way Street. *Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy*, 3.

Hein, P. (2017). Riding with the Devils: China's Role in the Cambodian and Sri Lankan Conflicts. *India Quarterly*, 73(1), 9–12.

Lengauer, S. (2011). China's Foreign Aid Policy: Motive and Method." *Culture Mandala*, 9(2), 37.

Lim, D. J., & Mukherjee, R. (2017). What Money Can't Buy: The Security Externalities of Chinese Economic Statecraft in Post-War Sri Lanka. *Asian Security*, 15(2), 10.

Parker, S., & Chefitz, G. (2018). Debtbook Diplomacy: China's Strategic Leveraging of It's Newfound Economic Influence and the Consequences for US Foreign Policy. *Cambridge*.

Putra, I. G. N. A. P., Fasisaka, I., & Prameswari, A. A. A. I. (2019). Kepentingan Tiongkok Dalam Akusisi Pelabuhan Hambantota Sri Lanka. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1–3.

Ramesh, R., Ijhas, M. M., & Dickwella, R. (2013). Accountability, Transparency and Corruption in Decentralized Governance: A Case of Local Government in Sri Lanka. *Proceedings of the Third International Symposium*, 59.

Se, W. (2019). Putting Sri Lanka's Debt Issu into Perspective. *CIR*, 29(3), 89.

- Silva, S. De. (2018). Trapped Between the Dragon and South Asia's Big Brother: The Case of Sri Lanka's 'Balanced' Foreign Policy. *Sri Lanka Journal of Social Sciences*, 41(2), 70.
- Sultana, G. (2016). Sri Lanka after Rajapaksa: Can It Ignore China? *Strategic Analysis*, 40(4), 247.
- Wibisono, A. N. (2019). China's 'Belt and Road Initiative' in Sri Lanka: Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment.' *MANDALA*, 2(2), 223.
- Wijayasiri, J., & Senaratne, N. (2018). *China's Belt and Road Initiative (BRI) and Sri Lanka*. 388.

Webpage with an author

- Chowdhury, D. R. (2015). *Let Bygones Be Bygones, Colombo Urges Beijing, as Chinese Loans Take Their Toll*. South China Morning Post.
<https://www.scmp.com/business/global-economy/article/1869177/let-bygones-be-bygones-sri-lanka-urges-china>
- Freyman, E. (2018). *The Invention of the New Silk Road: Mapping X Jinping's Strategic Vision*. Cambridge.
- Hillman, J. E. (2018). *Game of Loans: How China Bought Hambantota*. Center For Strategic and International Studies (CSIS).
<https://www.csis.org/analysis/game-loans-how-china-bought-hambantota>
- International Crisis Group. (2007). *Sri Lanka's Human Right Crisis*. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-s-human-rights-crisis>.
- Silva, R. (2012). *Seven Investors to Bring in US \$514.8m*. The Sunday Leader.
<http://www.thesundayleader.lk/2012/12/09/seven-investors-to-bring-in-us514-8m-dr-wickrama/>
- The Economic Times. (2015). *Chinese Firm Claims Heavy Losses after Sri Lanka Halts Port Project*. The Economic Times.
<https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/chinese-firm-claims-heavy-losses-after-sri-lanka-halts-port-project/articleshow/46539400.cms?from=mdr>

Government publication

- Central Bank of Sri Lanka. (2015). *Annual Report*.